

Relasi Bisnis dan Politik :

Studi Peran Keluarga “Dewi Sri” Dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes 2017 – 2022

Jerry Abriel Kusuma Aji – 14010116140056

Jerryvabriel07@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Adnan, MA.

Departemen Politik Dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Sejak pemilihan Kepala daerah dilakukan secara langsung, banyak kalangan pengusaha atau keluarga pengusaha yang terjun ikut meramaikan kompetisi pemilihan langsung tersebut. Di Jawa tengah, Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah yang Bupati nya berasal dari keluarga pengusaha. Apakah Bupati yang berasal dari keluarga pengusaha tidak menimbulkan *conflict of interest*? Apakah keluarga pengusaha tersebut tidak berusaha memengaruhi kebijakan di Daerah yang akan menguntungkan bisnisnya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh keluarga bagi Bupati yang berasal dari lingkungan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memperoleh data penelitian melalui sumber primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dari dokumen maupun data laporan instansi terkait.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes tidak lagi dominan. Suami Idza Priyanti yang pada saat awal periode kepemimpinannya sebagai Bupati Brebes sangat terlihat dominasinya terhadap kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti, saat ini tidak menunjukkan adanya intervensi dalam kebijakan yang dibuat. Hal ini disebabkan karena Idza Priyanti sudah lama diincar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena banyak kebijakan – kebijakan yang dibuat bersifat kolusif dan nepotis yang menguntungkan dirinya ataupun keluarganya. Selain itu prinsip –prinsip *good governance* juga dijalankan dalam periode Pemerintahan Idza Priyanti saat ini, sehingga praktik – praktik seperti intervensi kebijakan yang dilakukan oleh suaminya sendiri tidak terjadi lagi.

Keyword : Peran keluarga “Dewi Sri”, Memengaruhi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pengamanan terhadap aset kekayaan menjadi salahsatu alasan pengusaha lokal untuk turun langsung dalam kontestasi politik lokal dan berusaha untuk menjadi pemenangnya. Dengan modal material yang besar para pengusaha lokal berlomba-lomba untuk menjadi kepala daerah atau pemimpin di daerah. sehingga dengan keikutsertaan dalam pemerintahan, kebijakan yang dibuat para elit tersebut dibuat untuk menguntungkan kekayaannya. Hal tersebut yang sudah terjadi di Kabupaten Brebes, dimana terdapat elit lokal yang berlatarbelakang sebagai pebisnis yang menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes dan berusaha untuk mengamankan kekayaannya. Berangkat dari keluarga pebisnis dan mempunyai berbagai macam bisnis yang sudah dijalankan, tidak menutup kemungkinan dengan mengamankan kursi Kepala Daerah maka dapat mengamankan bisnis atau kekayaan melalui kebijakan yang dibuat. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan berfokus mengenai peran keluarga dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Bupati yang akan menguntungkan bisnis keluarganya.

Relasi bisnis dan politik di aras lokal ditandai dengan terpilihnya pengusaha/pebisnis sebagai Kepala Daerah maupun anggota legislatif daerah. pengusaha/pebisnis memainkan perannya sebagai kepala daerah sekaligus sebagai pemilik perusahaan, dengan mengadakan proyek-proyek maupun melalui kebijakan yang ia buat untuk memperkaya diri ataupun keluarganya. Hal tersebut pernah terjadi di Provinsi Banten yang pada saat itu di pimpin oleh Ratu Atut. Pada saat menjadi Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut setidaknya menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten(<https://www.wartaekonomi.co.id/read17956/menguak-bisnis-dinasti-politik-di-banten-ii.html>diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 19.05 WIB). Secara keseluruhan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Provinsi Banten diduga perusahaan yang dikendalikan langusng oleh Ratu Atut dan jaringannya mendapatkan 175 proyek dengan total nilai kontrak Rp 1.148 Triliun (<https://www.wartaekonomi.co.id/read17956/menguak-bisnis-dinasti-politik-di-banten-ii.html>diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 19.06 WIB).Ada dua modus yang digunakan Ratu Atut untuk mendapatkan proyek pengadaan barang/jasa di Banten, yaitu melalui perusahaan yang dikuasai oleh keluarga Ratu Atut secara langsung ataupun perusahaan lain yang menjadi kartel Ratu Atut. Hal itu menunjukkan gurita bisnis Ratu Atut

menguasai proyek pengadaan barang/jasa yang ada di Banten. Keluarga Ratu Atut menguasai Provinsis Banten dari hulu ke hilir secara sistematis. Mulai dari perencanaan APBD hingga tender proyek pengadaan barang/jasa keluarga Ratu Atut pasti berperan. Mulai dari eksekutif, legislatif dan birokrasi dikuasai oeh keluarga Ratu Atut.

Relasi bisnis dan politik dalam kaitannya untuk memperkaya diri dan keluarganya pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sorotan masyarakat terhadap beberapa beberapa deposit terbesar Bank Century, khususnya Siti Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerna, sangat wajar, mengingat besarnya bantuan kedua kelompok bisnis yang mereka pimpin bagi kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya. Dukungan ini dimulai oleh Hartati Murdaya menjelang Pemilu 2004 dan semakin meningkat menjelang Pemilu 2009. Pengelola Arena Pekan Raya Jakarta ini berulang kali menyediakan gelanggang promosi bisnisnya sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Partai Demokrat, termasuk Rapimnas Partai Demokrat, 8-9 Februari 2009. Mengenakan jaket biru Partai Demokrat, ia duduk di barisan terdepan, sebaris dengan SBY, Ani Yudhoyono, dan Hadi Utomo. Selanjutnya, dalam tim kampanye SBY-Boediono, Hartati menjadi Wakil Koordinator Operasi I. (George Junus, 2010:76)

Sedangkan dari kelompok Sampoerna, investigasi kami menemukan dukungan dana sebesar Rp 90 milyar kepada kelompok media Jurnal Nasional (Jurnas) yang dekat dengan Partai Demokrat dan SBY sejak 2006 sampai dengan 2009. Di saat itu, injeksi dana ke kelompok Jurnas mulai bergeser ke pengusaha-pengusaha yang dekat dengan keluarga Cikeas, di bawah koordinasi Gatot Mudiantoro Suwondo, yang kebetulan Direktur Utama BNI(George Junus, 2010:76).

Hal yang sama juga sedang terjadi di Kabupaten Brebes. Terdapat satu oligark lokal yang menguasai Pemerintahan yang berlatarbelakang sebagai pengusaha/pebisnis. Dengan modal material oligark ini mampu menempati kursi Kepala daerah Kabupaten Brebes. Berlatar belakang keluarga pebisnis dengan bisnis yang sangat dikenal di masyarakat tegal raya dan mempunyai perusahaan otobus terbesar di Tegal Raya, biasa dikenal PO Dewi Sri. Salah satu dari anggota keluarga Dewi Sri mampu menduduki Kepala Daerah Kabupaten Brebes selama dua periode. Sebelumnya dua anak lainnnya dari keluarga Dewi Sri juga mampu menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang dan Kota Tegal.

PO Dewi Sri sendiri didirikan oleh H. Ismail dan Hj. Rokhayah, yang kemudian perusahaan ini di wariskan oleh anak – anaknya yaitu Idza Priyanti, Ikmal Jaya, dan Mukti Agung Wibowo. Terdapat hal yang menarik perhatian masyarakat dimana, ketiga anaknya mampu menduduki jabatan strategis dengan menjadi kepala daerah di tiga daerah yang berbeda yaitu di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Hal ini menandakan ada niatan tersendiri dari keluarga besar PO Dewi Sri untuk menguasai daerah Tegal dan sekitarnya dengan menempatkan keluarganya menjadi kepala daerah di Tegal dan sekitarnya. Bisnis keluarga PO Dewi Sri yang bisa dibilang sukses dibidang transportasi darat lantas tidak memberikan rasa puas terhadap apa yang telah di raih oleh keluarga Dewi Sri. Ketiga anak dari pendiri PO Dewi yang sekaligus menjabat sebagai direktur utama, mengekspansi bisnisnya ke ranah politik lokal. Ekspansi bisnis dengan terjun ke ranah politik yang dilakukan oleh keluarga PO Dewi Sri bisa dikatakan cukup berhasil. Terbukti dengan terpilihnya ketiga anaknya menjadi kepala daerah di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Saat ini yang tersisa menduduki jabatan publik dari keluarga Dewi Sri adalah Idza Priyanti, yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes. Sekaligus mampu menjabat sebagai Bupati Brebes selama dua periode. Penempatan Idza Priyati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes bukan tanpa alasan. Pasalnya jika dilihat dari bisnis keluarga Dewi Sri di bidang transportasi sedang meredup. Ditambah dengan tersandungnya kasus korupsi oleh Ikmal Jaya pada saat menjabat sebagai Wali Kota Tegal. Idza Priyanti seperti menjadi harapan bagi keluarga Dewi Sri untuk menyelamatkan nama dan sekaligus sebagai pengaman kekuasaan dan pengaruh di Tegal Raya sekaligus sebagai pengaman kekayaan keluarga Dewi Sri. Seperti yang diungkapkan oleh Winters, bahwa alasan oligark tetap dalam kekuasaan adalah untuk mengamankan kekayaannya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis KPK pada tahun 2016, menyebutkan bahwa pada saat akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti memiliki kekayaan sebesar Rp 7,67 miliar, yang menjadikan Idza Priyanti sebagai calon Bupati terkaya dibandingkan calon lainnya (<http://brebesnews.co/2016/12/ini-daftar-kekayaan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-brebes/> diakses pada 28 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB). Tidak menutup kemungkinan dengan kekayaan sebesar itu ditambah bisnis keluarga yang sudah menggurita, Idza Priyanti sebagai satu-satunya anggota keluarga Dewi Sri yang masih menjabat sebagai pejabat

publik, membuat suatu kebijakan atau mengadakan proyek-proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengamankan kekayaannya.

Pada saat pencalonan Bu Idza Periode 2017-2022 sebagai Bupati Kabupaten Brebes, memang terdapat dorongan dari keluarga terutama yang paling berperan adalah Pak Warsidin selaku suami. Memang pada saat pencalonan pertamakali pada tahun 2012 terdapat dorongan dari keluarga “Dewi Sri” untuk mendirikan dinasti politik di wilayah Tegal Raya yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal. Tetapi hal tersebut tidak terjadi akibat salahsatu anggota keluarga yaitu Ikmal Jaya yang pada tahun 2009-2014 menjabat sebagai Walikota Kota Tegal terjerat kasus korupsi pada tahun 2013. Pada tahun 2016 Mukti Agung mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pemalang tetapi gagal. Sehingga dinasti politik Dewi Sri tidak terbangun di wilayah Tegal Raya.

Dari kegagalan yang dialami oleh Mukti Agung di kabupaten Pemalang, ditambah terjeratnya Ikmal Jaya dalam kasus korupsi, membuat keluarga “Dewi Sri” berusaha memertahankan kekuasaannya di Kabupaten Brebes. Peran keluarga dan dukungan relative besar, ketika Bu Idza bertarung dalam kontestasi Pemilukada Kabupaten Brebes, keluarga “Dewi Sri” termasuk saudara – saudara Bu Idza terlibat langsung dalam membantu memenangkan Pemilukada Kabupaten Brebes baik pada tahun 2012 maupun pada tahun 2017.

“Untuk perkara tersebut, secara personal tentunya ada dorongan keluarga dan menjadi motivasi karena mencalonkan diri sebagai bupati yang tidak mudah dan banyak indikatornya. peran keluarga dan dukungan relatif besar. Jadi ketika beliau bertarung di konstelasi komti ini, saudara-saudara beliau terlibat langsung membantu beliau dalam memenangkan pemilu baik tahun 2012 maupun 2017 dan itu semuyun di keluarga beliau. Tidak ada batasan antara kakak-adik dan itu memang kompak, dari kekompakan ini berikutnya mempunyai relawan-relawan dari partai maupun relawan pribadi yang bersatu sehingga beliau memenangkan dua periode dan lawannya juga tidak dapat dianggap remeh sebab yang satu berasal dari petahana kemudian yang lain adalah mantan menteri maka itu tidaklah mudah. Kegotongroyongan di keluarga beliau memang kompak karena semuyun dalam kancah politik brebes.”(transkrip wawancara dengan Bu Idza, Bupati Kabupaten Brebes)

Pihak keluarga yang paling berperan besar dalam kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti adalah suaminya sendiri. Suaminya yang merupakan seorang perwira Kepolisian Republik Indonesia sangat berperan besar dalam memengaruhi kebijakan

yang dibuar oleh Idza Priyanti. Setia kebijakan yang dikeluarkan oleh Idza Priyanti tidak terlepas dari peran serta suaminya dibelakangnya. Banyak dari pernyataan-pernyataan Idza Priyanti mengenai pengampilan keputusan untuk Pemerintah Kabupaten Brebes dikeluarkan oleh suaminya. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kabupaten Brebes bahwa suami Idza Priyanti yang biasa disebut “AYAH E” mengendalikan kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Brebes saat ini.

“Dugaan mengarah ke pihak suami karena saya rasa memiliki pengaruh yang cukup besar dan kiranya sudah umum stereotip bahwa perempuan masih kalah cakap dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Ditambah beliau (bupati) jarang mengeluarkan *statement-statement*. Dalam agama sendiri (Islam), Jika pemimpin itu seorang perempuan maka banyak kemudratananya kecuali dia bisa menguasai itu (dominan dibanding suami jika sudah berumah tangga). Apabila perempuan masih kalah dominan dibandingkan pasangannya, sebaiknya tidak memimpin karena nantinya kepemimpinannya tidak akan berjalan baik. Saya sempat mendapat cerita ketika ada seseorang hendak bertemu dengan bupati tapi bukannya mendapati bupati di tempat justru ujaran suaminya yang mengatakan bahwa, bupati saat ini tidak dapat ditemui saat ini karena alasan tertentu (capek) dan bisa mewakili urusan bupati melaluinya sehingga kebijaksanaan yang tercipta yaitu kebijaksanaannya (suami) bukan bupati.” (transkrip wawancara dengan Indra Kusuma, Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes)

Berdasarkan argumen tersebut peneliti berusaha untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana peran keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai peran keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

OLIGARKI

Dalam Jeffrey S. Winters (2011:10), oligarki didefinisikan sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Tetapi jika konsep dari oligarki hanya diartikan sebagai penguasaan minoritas terhadap mayoritas, maka hal tersebut dirasa kurang cukup mewakili. Bila konsep oligarki didasarkan pada hal yang demikian, maka setiap kekuasaan, pengaruh, atau pemerintahan, yang menempatkan minoritas dalam memimpin, maka dapat disebut sebagai oligarki. Sehingga apa yang disebut sebagai oligarki menurut Winters penting untuk menempatkannya kedalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan-kekayaan material yang sangat susah untuk dipecahkan dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Dengan demikian kekuasaan yang

oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya harus sistemik.

Menurut Winters (2011:11), teorisasi oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula. Meskipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai setara, akan tetapi kekayaan yang besar ditangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut. Klaim ini didasarkan pada distribusi sumberdaya material diantara anggota komunitas politik, demokrasi, atau sistem lainnya, yang memiliki pengaruh besar pada kekuasaan. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, semakin besar kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan dan pengaruh politik.

Klaim teoritik tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara uang (kekayaan) dan kekuasaan yang menyebarkan dalam sistem politik manusia. Studi mengenai Oligark dan Oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan politik yang spesifik di sekitar kuasa tersebut. Penekanannya ada pada dampak politik kesenjangan material terhadap “kesenjangan kondisi” yang membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu, menurut Winters (2011:8), teori Oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya. Selain juga harus peka terhadap bagaimana dan mengapa politik seputar kekayaan sebagai kekuasaan telah berubah seiring perkembangan waktu.

Berdasarkan fakta demikian, Winters (2011:8) memulai penjelasannya mengenai Oligarki dari apa yang dimaksud dengan Oligark. Winters (2011:8) mendefinisikan Oligark sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya”. Berdasarkan definisi itu, terdapat tiga hal yang saling bersangkutan paut, antara lain, pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan yang material berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas; kedua, penguasaan dan

pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi; dan ketiga, definisi Oligark tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus.

Winters (2011:9) memperkenalkan konsep “pertahanan kekayaan”.Sepanjang perjalanan sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Ini dimaknai sebagai pengambilalihan sumber daya material dari Oligark. Oleh karena itu, maka dinamika politik para Oligark selalu berhubungan dengan ancaman tersebut, dan bagaimana Oligark mempertahankannya. Pertahanan kekayaan ini mencakup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan.Winters (2011:10) memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark)”. Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari Oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para Oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis.

GOOD GOVERNANCE

Dwiyanto (dalam Safrijal dkk, 2016:179) Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang Good Governance berbeda- beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan Good Governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik Good Governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

Sugandi (dalam Safrijal dkk, 2016:179) birokrasi pada sektor publik, pada dasarnya di hadirkan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder, yang harus di layani secara optimal. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: sederhana, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good Governance, yaitu: Good Governance (tata pemerintahan yang baik), Good Government (pemerintahan yang baik), dan Clean Governance (pemerintahan yang bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas Good Governance, maka adapun beberapa pengertian dari Good Governance, antara lain :

1. Menurut Bank Dunia (World Bank). Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Adisasmita,2011).
2. Menurut UNDP (United National Development Planning). Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif ingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Adisasmita, 2011).

Sementara itu UNDP dalam (Rosidin,2010:179) berorientasi meliputi participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif pada antara ain:

1. Partisipasi (participation)
2. Penegakan Hukum (Rule of law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Daya Tanggap (Responsiveness)
5. Berorientasi pada consensus (consensus orientation)
6. Keadilan (equity)
7. Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Visi Strategis (Strategic vision)

Rosidin (dalam Safrijal dkk, 2016:180) terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan anspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

PEMBAHASAN

ANALISIS PERAN KELUARGA “DEWI SRI” DALAM MEMENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 2017-2022

Rosidin (dalam Safrijal dkk, 2016:180) terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga antirasuah di Indonesia sangat berperan besar dalam mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Brebes. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPK kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sehingga peran keluarga dalam mengintervensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes hanya sebatas mengarahkan agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Idza Priyanti selaku Kepala Daerah berhati – hati dari adanya intervensi keluarga.

Memang faktanya terdapat kabar bahwa Idza Priyanti sudah lama diincar oleh KPK terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak keluarga yang memainkan perannya terhadap kebijakan – kebijakan yang dibuat, hal ini diaminkan oleh Indra Kusuma yang merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes. Ditambah dengan ditetapkannya adiknya Ikmal Jaya selaku Walikota Kota Tegal periode tahun 2008-2013 sebagai tersangka kasus korupsi, membuat Idza Priyanti berhati-hati dalam adanya intervensi yang dilakukan oleh keluarga.

Minimnya peran keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti tidak terlepas dari peran masyarakat Kabupaten Brebes. Kemudahan informasi yang didapatkan oleh masyarakat sehingga dapat menjadi alat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu menguatnya fungsi KPK juga menjadi point penting dalam terselenggaranya pemerintah daerah yang transparan

dan akuntabel. Sehingga dengan adanya peran aktif masyarakat dan juga ditambah dengan adanya KPK pemerintah daerah khususnya Kabupaten Brebes dapat mewujudkan *good governance*.

Melani D Selamat (2013) mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mempersempit kesepuluh prinsip *good governance* ke dalam tiga prinsip utama, yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya *Good governance* merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih dan juga merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ketiga prinsip *good governance* tersebut yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang sedang dicoba dijalankan oleh Idza Priyanti di Kabupaten Brebes. Meskipun peran dari keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya masih sangat dominan dalam kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti, tetapi prinsip – prinsip *good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan tetap dijalankan. Semenjak KPK “mendikte” Idza Priyanti atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dinilai terdapat penyelewengan yang dilakukannya, Idza Priyanti sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan maupun dalam penetapan kebijakan. Pada saat awal periode kepemimpinannya selama menjadi Bupati Kabupaten Brebes banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat banyak intervensi dari keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya. Dengan adanya teguran dari KPK dan ditambah partisipasi masyarakat Kabupaten Brebes yang semakin kritis terhadap kebijakan – kebijakan yang kolusif dan nepotis yang dibuat oleh Idza Priyanti, membuat kebijakan yang sekarang dibuat oleh Idza Priyanti sangat memerhatikan prinsip – prinsip *good governance* dan sangat berhati – hati atas adanya intervensi yang dilakukan oleh keluarganya termasuk suaminya. Peran yang sangat dominan yang dilakukan oleh suaminya membuat Idza Priyanti sudah lama dalam pengawasan KPK, karena dinilai tidak dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan baik dan banyak kebijakan yang sifatnya kolusif dan nepotis yang dibuat.

Dengan adanya era keterbukaan saat ini dan juga masyarakat luas dapat menerima informasi dari sumber mana saja yang terpercaya, tentu membuat peran keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti sangat dihindari, khususnya intervensi yang dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut merupakan salahsatu penerapan prinsip *good governance* yaitu prinsip partisipasi. Dimana masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan, dalam hal ini Idza Priyanti sebagai Pemimpin/Bupati Kabupaten Brebes. Peran KPK juga sangat penting dalam implementasi *good governance* di Kabupaten Brebes. Dengan adanya KPK sebagai lembaga yang memang bertugas menangani kasus korupsi, membuat kepala daerah khususnya Idza Priyanti mau tidak mau harus membuat kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghindari adanya kebijakan yang kolusif dan nepotis yang bertujuan untuk memerkaya diri sendiri dan keluarganya.

Prinsip transparansi juga sudah mulai dijalankan oleh Idza Priyanti di Kabupaten Brebes. Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana public, sampai pada tahapan evaluasi. Kemudahan akses informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes sehingga masyarakat akan dengan mudah menilai dan melihat kebijakan yang memang diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun keluarganya. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa memang peran KPK disini sangat penting dalam penerapan prinsip transparansi. Sehingga pihak keluarga “Dewi Sri” maupun suaminya sangat berhati – hati dalam melakukan adanya intervensi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti.

Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan *good governance* juga dijalankan dalam Pemerintah Kabupaten Brebes. Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya di berikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (stake holder), yaitu masyarakat luas. Minimnya peran keluarga “Dewi Sri” dalam melakukan intervensi kebijakan, membuat pertanggungjawaban penggunaan APBD Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun semakin baik. Terlebih semenjak Idza Priyanti menjadi incaran KPK, membuat intervensi yang dilakukan

keluarga terhadap anggaran publik sangat dihindari oleh Idza Priyanti. Sekali lagi bahwa peran KPK sangat penting dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Brebes.

Prinsip – prinsip *good governance* yang saat ini dijalankan oleh Idza Priyanti dalam periode kedua jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Brebes, mampu menjadi penghalang bagi terjadinya intervensi keluarga terhadap kebijakan – kebijakan yang dibuat. Sebelum KPK membidik Idza Priyanti sebagai sasaran selanjutnya, praktik – praktik intervensi keluarga dalam kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti lazim terjadi. Banyak kebijakan – kebijakan yang dibuat saat itu sebenarnya adalah hasil dari intervensi keluarga khususnya suaminya. Seperti kebijakan lelang jabatan maupun pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes saat itu belum menerapkan prinsip – prinsip *good governance* dalam menjalankan pemerintahan.

Prinsip – prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini membuat intervensi yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya berkurang. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat ikut berperan dalam pengambilan kebijakan dan mengawal jalannya proses kebijakan sehingga masyarakat dapat mengetahui ketika terjadi adanya penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh Idza Priyanti yang ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun keluarga. Selain itu KPK juga selalu mendorong masyarakat untuk terus mengawal jalannya proses pemerintahan, agar kebijakan yang dibuat memang sesuai dengan visi dan misi dan menghindari kebijakan yang kolusif dan nepotis. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga demikian, dengan menerapkan kedua prinsip tersebut di Pemerintah Kabupaten Brebes, intervensi terhadap yang dilakukan suaminya tidak begitu terlihat. Kemudahan mengakses informasi yang didapat oleh masyarakat, membuat Idza Priyanti sangat berhati – hati dalam adanya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri”. Terlebih lagi KPK sudah membidik Idza Priyanti sudah sejak lama, sehingga dari adanya hal tersebut membuat Idza Priyanti menerapkan prinsip – prinsip *good governance* dalam Pemerintahan Kabupaten Brebes untuk menghindari adanya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh suaminya.

Meskipun peran/intervensi yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya masih ada dalam kebijakan – kebijakan tertentu seperti lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa, tetapi sudah tidak begitu dominan lagi. Hal tersebut

dikarenakan prinsip – prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dijalankan saat ini mampu menjadi penghalang bagi adanya intervensi kebijakan oleh keluarga “Dewi Sri”.

Tabel 3.1 IPM Kabupaten Brebes

Komponen	IPM Kabupaten Brebes									
	IPM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IPM		60.51	60.92	61.87	62.55	63.18	63.98	64.86	65.68	66.12

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun IPM Kabupaten Brebes selalu mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlepas adanya penerapan prinsip – prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Brebes. Berkurangnya peran/intervensi dari keluarga “Dewi Sri” terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes, juga menjadi point penting dalam terciptanya *good governance* di Kabupaten Brebes. Prinsip – prinsip *good governance* yang dijalankan cukup mengurangi adanya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri”. sehingga IPM Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Winters (2011:10) memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark)”. Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari Oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para Oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis. Winters (2011:9) memperkenalkan konsep “pertahanan kekayaan”.Sepanjang perjalanan sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Ini dimaknai sebagai pengambilalihan sumber daya material dari Oligark. Oleh karena itu, maka dinamika politik para Oligark selalu berhubungan dengan ancaman tersebut, dan bagaimana Oligark mempertahankannya. Pertahanan kekayaan ini mencakup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan.

Keluarga “Dewi Sri” merupakan salah satu bentuk praktik oligarki di wilayah Tegal raya. Pada kurun waktu 2008-2013 keluarga “Dewi Sri”berhasil menguasai wilayah tegal raya yaitu kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang. Sehingga wilayah Tegal raya sering disebut oleh masyarakat umum sebagai wilayah “Dinasti Dewi Sri”.

Penguasaan terhadap tiga wilayah tersebut tentunya bukan tanpa alasan, jika dilihat dari teori oligarki yang dikemukakan oleh Winters, tentu penguasaan terhadap tiga wilayah bertujuan untuk pertahanan kekayaan. Dengan besarnya sumberdaya material yang berasal dari bisnisnya, sehingga membuat keluarga “Dewi Sri” mampu menguasai wilayah Tegal raya dalam kurun waktu 2008-2013. Menurut Winters, Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, semakin besar kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan dan pengaruh politik. Sehingga penguasaan politik dan pengaruh di tiga wilayah Tegal Raya wajar saja terjadi, karena besarnya sumberdaya material yang dimiliki oleh keluarga “Dewi Sri”.

Akan tetapi semenjak tahun 2012, diawali dengan ditetapkannya Ikmal Jaya, Walikota Kota Tegal sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tanah di Kecamatan Bokongsemar Kota Tegal, Dinasti Politik Dewi Sri mulai runtuh. Kekalahan yang dialami oleh Mukti Agung di Pemilukada Kabupaten Pemalang dan Juga Dr. Edy di Pemilukada Kabupaten Tegal membuat dinasti politik Dewi Sri runtuh. Dari ketiga wilayah di Tegal raya, kabupaten Pemalang, Kota Tegal dan kabupaten Brebes, kini hanya tersisa Kabupaten Brebes. Idza Priyanti pada tahun 2017 mampu memenangkan Pemilukada Kabupaten Brebes untuk kedua kalinya.

Menurut Winters (2011:11), teorisasi oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis KPK pada tahun 2016, menyebutkan bahwa pada saat akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti memiliki kekayaan sebesar Rp 7,67 miliar, yang menjadikan Idza Priyanti sebagai calon Bupati terkaya dibandingkan calon lainnya. Sehingga dengan sumberdaya material yang besar mudah bagi Idza Priyanti memenangkan Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2017 untuk kedua kalinya.

Dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai setara, akan tetapi kekayaan yang besar ditangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut. Dengan sumberdaya material yang besar yang dimiliki oleh Keluarga “Dewi Sri”, sehingga hal tersebut mudah untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Brebes. Dalam pencalonannya yang kedua, Idza Priyanti berhasil mengalahkan penantanganya Dr. H. Suswono mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II dengan hasil yang cukup telak 67,01 % dengan perolehan suara sebanyak 548.657 suara.

Tentunya kemenangan yang cukup telak ini tidak terlepas dari peran Keluarga Idza Priyanti dalam memenangkan dirinya. Peran keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi setiap kebijakan yang Idza Priyanti buat seharusnya tidak dapat terhindarkan. Suaminya sendiri sangat berperan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti.

Winters (2011:9) menjelaskan bahwa kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Ini dimaknai sebagai pengambilalihan sumber daya material dari Oligark. Kekayaan yang dimiliki oleh Keluarga “Dewi Sri”, nampaknya berhasil membuat Idza Priyanti tetap menduduki sebagai Bupati. Maka perlu adanya pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” melalui penempatan Idza Priyanti sebagai Bupati Brebes. Peran keluarga Idza Priyanti dalam memengaruhi kebijakan yang dia buat yang bertujuan untuk memertahankan kekayaan keluarga “Dewi Sri” tidak terjadi saat ini. Kehati-hatian yang ditunjukkan oleh Idza Priyanti dalam setiap kebijakannya menunjukkan peran keluarga dalam memengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sangat minimal.

Oligarki tidak secara langsung mendikte kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti sebagai Bupati. Hal ini dikarenakan KPK sudah lama mengincar Idza Priyanti karena menduga terdapat praktik korupsi di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Idza Priyanti dan keluarganya. Sebelum adanya teguran dari KPK kepada Idza Priyanti konsep pertahanan kekayaan memang terjadi di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh keluarga “dewi Sri” melalui Idza Priyanti. Dimana peran suami Idza Priyanti sangat dominan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti. Sehingga pada saat periode awal kepemimpinan Idza Priyanti sebagai Bupati, kebijakan seperti pengadaan barang dan jasa maupun lelang jabatan semua dikendalikan oleh keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya.

Keluarga “Dewi Sri” tidak secara langsung ikut serta dalam pemerintahan. Tetapi tanpa dorongan dari Keluarga “Dewi Sri” tidak mungkin Idza Priyanti dapat memenangkan Pemilukada kabupaten Brebes untuk yang kedua kalinya. Mengingat pada periode sebelumnya dalam memimpin Kabupaten Brebes banyak sekali masalah yang belum terselesaikan, mulai dari masalah kesehatan sampai masalah kemiskinan. Sehingga bukan tanpa alasan pastinya Keluarga “Dewi Sri” sekuat tenaga untuk memenangkan Idza Priyanti pada Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2017. Dalam kata lain, walaupun oligarki dalam hal ini keluarga “Dewi Sri” tidak secara langsung terlibat dalam pemerintahan akan tetapi intervensi kebijakan kepada Idza Priyanti

selaku Bupati sangat dominan. Sehingga konsep pertahanan kekayaan menjadi alasan bagi oligarki untuk mendukung penuh pemenangan Idza Priyanti dalam pencalonan Bupati yang kedua kalinya.

Winters (2011) dalam Oligarki menjelaskan mengenai Oligark. Winters (2011:8) mendefinisikan Oligark sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya”. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Winters itu, terdapat tiga hal yang saling bersangkutan paut, antara lain, pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan yang material berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas; kedua, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi; dan ketiga, definisi Oligark tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus. Dari penjelasan Winters mengenai oligark, bahwa Keluarga “Dewi Sri” melalui Idza Priyanti merupakan salahsatu oligark yang berusaha mengendalikan dan mengendalikan sumberdaya material yang digunakan untuk memertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Tetapi dalam temuannya, oligark tidak secara langsung mendikte kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti yang ditujukan untuk keuntungan pribadi ataupun keluarganya. Dalam setiap kebijakan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Kabupaten Brebes terdapat indikasi intervensi yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya. Tetapi setelah adanya teguran dari KPK untuk Idza Priyanti, intervensi yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya menjadi berkurang. Pemanfaatan sumberdaya material yang dimiliki bukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi melalui intervensi kebijakan, tetapi lebih kepada memertahankan dan meningkatkan posisi sosialnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pihak keluarga yang paling berperan besar dalam kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti adalah suaminya sendiri. Suaminya yang merupakan seorang perwira Kepolisian Republik Indonesia sangat berperan besar dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Idza Priyanti tidak terlepas dari peran serta suaminya dibelakangnya. Banyak dari pernyataan-pernyataan Idza Priyanti mengenai pengambilan keputusan untuk Pemerintah Kabupaten Brebes dikeluarkan oleh suaminya. Sehingga sudah menjadi rahasia umum

bagi masyarakat Kabupaten Brebes bahwa suami Idza Priyanti yang biasa disebut “AYAH E” mengendalikan kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Brebes saat ini.

Meskipun peran dari keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya masih sangat dominan dalam kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti, tetapi prinsip – prinsip *good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan tetap dijalankan. Semenjak KPK “mendikte” Idza Priyanti atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dinilai terdapat penyelewengan yang dilakukannya, Idza Priyanti sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan maupun dalam penetapan kebijakan. Pada saat awal periode kepemimpinannya selama menjadi Bupati Kabupaten Brebes banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat banyak intervensi dari keluarga “Dewi Sri” khususnya suaminya. Dengan adanya teguran dari KPK dan ditambah partisipasi masyarakat Kabupaten Brebes yang semakin kritis terhadap kebijakan – kebijakan yang kolusif dan nepotis yang dibuat oleh Idza Priyanti, membuat kebijakan yang sekarang dibuat oleh Idza Priyanti sangat memerhatikan prinsip – prinsip *good governance* dan sangat berhati – hati atas adanya intervensi yang dilakukan oleh keluarganya termasuk suaminya. Peran yang sangat dominan yang dilakukan oleh suaminya membuat Idza Priyanti sudah lama dalam pengawasan KPK, karena dinilai tidak dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan baik dan banyak kebijakan yang sifatnya kolusif dan nepotis yang dibuat.

Penerapan prinsip – prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas membuat praktik intervensi kebijakan yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” khususnya suami Idza Priyanti sudah tidak lagi dominan. Penerapan prinsip – prinsip *good governance* yang saat ini dijalankan oleh Idza Priyanti dalam Pemerintah Kabupaten Brebes tidak terlepas dari peran aktif KPK dalam memberantas dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah termasuk Idza Priyanti.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pihak – pihak yang telah menjadi narasumber dan responden didalam penelitian ini. Serta bapak Dr. Dra. Muhammad Adnan, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aditjondro , George Junus. 2010. *Membongkar Gurita Cikeas; Di Balik Skandal BankCentury*. Yogyakarta : Galangpress.
- Robinson, Richard dan Vedi R Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Winters, Jeffery A. 2011. *Oligarki*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanti, Melani Selamat. 2013. PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Governance Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsriat*, Vol. 5, No. 1
- Safrijal , M. Nasir Basyah , Hasbi Ali. 2016. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 176-191*

BPS Kabupaten Brebes

<https://www.wartaekonomi.co.id/read17956/menguak-bisnis-dinasti-politik-di-banten-ii.html> diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIB

<http://brebesnews.co/2016/12/ini-daftar-kekayaan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-brebes/> diakses pada 28 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB

<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 Maret 2020

Daftar Informan

Indra Kusuma (Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes)

Idza Priyanti (Bupati Kabupaten Brebes)

Warsito Eko Putro (Kepala Bagian Umum Setda Brebes)

Dodi (Kontraktor Kabupaten Brebes)

Sutaryono (Kepala dinas Dinperwaskim Kab. Bebes)

Ahmad Mahmud (Kepala Bagian Kesejahteraan Rayat Setda Brebes)

